KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT BINA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN
Kantor : Jl. Pattimura No.20, Gd. Sapta Taruna Lt. IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, email: bintekjatan@pu.go.id
Laboratorium : Jl. A.H. Nasution No. 264 Ujungberung Bandung 40294, Telp. 022-7802251, Fax. 022-7802726

Nomor : PA 0103-Be/430 Jakarta, 28 Maret 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pengelolaan Web Portal di Lingkungan DJBM

Yth. Para Kepala BBPJN/BPJN
di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga
di Tempat

Sehubungan dengan adanya kasus peretasan pada web portal Direktorat Jenderal Bina Marga dan juga arahan Kepala Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal PUPR tentang pengelolaan web portal di Direktorat Jenderal Bina Marga (**Terlampir**), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembuatan layout dan struktur web portal dilakukan oleh Pusat (Subdit DPSI-Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan), agar platform yang digunakan seragam dan lebih mudah dalam memonitor dan mengelola aplikasi webportal dan memperkecil peluang terjadinya peretasan. Balai hanya melakukan update konten melalui CMS (*Content Management System*) yang sudah disiapkan;
2. Perubahan layout dan penambahan fitur-fitur lainnya akan dibatasi, jika diperlukan fitur tambahan, maka harus diinfokan terlebih dahulu ke Pusat (Subdit DPSI-Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan) agar bisa dilakukan VA (*Vulnerability Assessment*) sebelum dipublish;
3. Template webportal balai (*layout* dan struktur web portal) saat ini sedang dilakukan *Vulnerability Assessment* (VA) dan *Penetration Test* (*Pentest*) oleh Pusdatin PUPR, selanjutnya setelah lolos VA dan Pentest, web portal balai akan dipublish ke server *production* dan siap untuk digunakan oleh Balai;
4. Point nomor 3 diatas berlaku untuk semua balai, baik yang selama ini mengelola webportal secara mandiri maupun yang dikelola oleh Pusat (Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan);

Untuk informasi lebih lanjut atau jika ada pertanyaan dapat menghubungi narahubung kami melalui Sdr. Made Sudiadnya (081391533604).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan,

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT BINA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Nyoman Suaryana
NIP. 196501071998031001

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Bina Marga;
2. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
3. Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I dan Wilayah II;
4. Direktur Jalan Bebas Hambatan;
5. Direktur Pembangunan Jalan.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7232366 Faksimile (021) 7220219

NOTA DINAS
NOMOR : 56/ND/Sd/2023

Yth. : (Daftar Penerima Terlampir)
Dari : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
Hal : Laporan Pembahasan Integrasi Portal Bina Marga dan Pengurangan Aplikasi pada Direktorat Jenderal Bina Marga
Tanggal : 13 Maret 2023

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Pembahasan Integrasi Portal Bina Marga dan Pengurangan Aplikasi pada Direktorat Jenderal Bina Marga yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 melalui media daring sebagaimana terlampir dengan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi meminta agar seluruh K/L di bawah koordinasinya untuk melakukan penyederhanaan proses bisnis dan aplikasi yang mendukungnya sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Presiden nomor 132 tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Tujuan utama dari SPBE adalah untuk mempermudah masyarakat dalam menerima layanan dari pemerintah.
3. Rencana di akhir tahun 2023 hanya akan ada 12 *website* (10 *website* Unit Organisasi yang terintegrasi dengan Unit Pelaksana Teknis, 1 *website* BPJT, dan 1 *website* LPJK), 72 aplikasi internal, dan 2 aplikasi untuk masyarakat/pelaku bisnis di Kementerian PUPR.
4. Tindak lanjut diskusi:
   a. Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan akan menyelenggarakan diskusi internal dengan seluruh unit kerja maupun UPT di Direktorat Jenderal Bina Marga untuk membuat perencanaan, *timeline*, serta kendala (jika ada) dalam pelaksanaan integrasi aplikasi.
   b. Hasil diskusi internal Ditjen Bina Marga tersebut akan disampaikan ke Pusdatin.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi,
Nazib Faizal
NIP. 197912172005021002

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Bina Marga;
3. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR.

Lampiran I.
Nota Dinas Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
Nomor : 56/ND/Sd/2023
Tanggal : 13 Maret 2023

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
2. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol;
3. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
4. Direktur Pembangunan Jalan;
5. Direktur Pembangunan Jembatan;
6. Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I;
7. Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II;
8. Direktur Jalan Bebas Hambatan;
9. Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan;
10. Direktur Kepatuhan Intern.

Lampiran II
Nota Dinas Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
Nomor : 56/ND/Sd/2023
Tanggal : 13 Maret 2023

<table>
<tr><th colspan="3">NOTULEN RAPAT</th></tr>
<tr><td>Notulen ke: 1</td><td colspan="2">Hari/tanggal: Senin, 13 Maret 2023</td></tr>
<tr><td>Jumlah halaman:</td><td colspan="2">Tempat: Daring</td></tr>
<tr><td>No. Undangan
UM 0102-Sd/228</td><td>Tanggal Undangan
10 Maret 2023</td><td>Pengundang:
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi</td></tr>
<tr><td colspan="3">Perihal: Undangan Koordinasi Integrasi Portal Bina Marga</td></tr>
<tr><td colspan="3">Pemimpin rapat: Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi</td></tr>
<tr><td>Disusun oleh:
Ramadhan Afwan Mutasodirin, S.Kom</td><td colspan="2">Agenda Rapat:
Pembahasan Integrasi Portal Bina Marga dan Pengurangan Aplikasi pada Direktorat Jenderal Bina Marga</td></tr>
<tr><td>Diperiksa oleh:
Dewi Indriyati, ST, M.T.I</td><td colspan="2">Peserta Rapat:
1. Perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Perwakilan dari Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol
3. Perwakilan dari Direktorat Pembangunan Jembatan
4. Perwakilan dari Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I
5. Perwakilan dari Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II
6. Perwakilan dari Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan
7. Perwakilan dari Direktorat Kepatuhan Intern
8. Perwakilan dari Pusat Data dan Teknologi Informasi</td></tr>
<tr><td colspan="3">Pelaksanaan Rapat</td></tr>
<tr><td colspan="3">Acara dibuka oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi pukul 09.00 WIB dan dihadiri oleh 24 orang peserta. Agenda rapat adalah Diskusi Pelaksanaan Integrasi Portal Bina Marga</td></tr>
<tr><td colspan="3">Diskusi</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. Latar belakang diadakan diskusi ini adalah sebagai berikut:
a. Latar belakang diadakan diskusi ini adalah adanya Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Presiden nomor 132 tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
b. Adanya kedua peraturan tersebut, ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi agar seluruh K/L di bawahnya melakukan penyederhanaan proses bisnis dan aplikasi yang mendukungnya.
c. Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi ditugasi Menteri untuk mengawal pelaksanaan SPBE di Kementerian PUPR.</td></tr>
</table>

2. Arahan dan Penjelasan Kepala Pusdatin adalah sebagai berikut:
   a. Konsep SPBE adalah untuk mempermudah masyarakat dalam menerima layanan dari pemerintah.
   b. Pada level nasional, terdapat sekitar 23 ribu aplikasi pada K/L. Pada awal tahun 2021 terdata berjumlah 811 aplikasi di Kementerian PUPR. Saat ini berjumlah 430 aplikasi setelah dilakukan penghapusan aplikasi.
   c. Rencana di akhir tahun 2023, di Kementerian PUPR hanya akan ada 12 *website*, 72 aplikasi internal, dan 2 aplikasi untuk masyarakat/pelaku bisnis. (tabel terlampir)

Tabel Rencana Pengurangan Jumlah Aplikasi & Website

Aplikasi / Website	Bulan (2023)								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aplikasi (Internal)	295	263	257	214	191	148	105	83	72
Website	133	12	12	12	12	12	12	12	12
G2C	1	1	1	1	1	1	1	1	1
G2B	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total	430	277	271	228	205	162	119	97	86

Keterangan :
Aplikasi Internal : Aplikasi yang digunakan untuk keperluan internal, seperti manajemen data spasial, manajemen kepegawaian, dan lain-lain
G2C : Aplikasi yang digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat. Saat ini menggunakan aplikasi SAHABAT PUPR
G2B : Aplikasi yang digunakan untuk pelayanan kepada pelaku bisnis. Saat ini menggunakan aplikasi Hub Perizinan yang telah terintegrasi dengan perizinan OSS

Kementerian PUPR telah mengurangi dan mengintegrasikan jumlah aplikasi pemerintahan dari 811 (*status: Januari 2021*) menjadi 430 (*status: Januari 2023*).

Adapun rencana tahun 2023 adalah mengurangi dan mengintegrasikan menjadi 86 aplikasi dan *website*

   d. Pada masing-masing unit kerja hanya akan ada 1 aplikasi **(rencana penggabungan aplikasi terlampir)**
   e. Penggabungan aplikasi perizinan pada Ditjen Bina Marga (jalan tol dan jalan non tol).
   f. *Website* yang dikelola di Kementerian PUPR berjumlah 12 terdiri dari 10 *website* unit organisasi, 1 *website* BPJT, 1 *website* LPJK.

2. Paparan Kepala Bidang Manajemen Teknologi Informasi, Pusdatin adalah sebagai berikut:
   a. *Website* Ditjen Bina Marga terintegrasi dengan *website* UPT. UPT tidak boleh *hosting* sendiri, harus ikut dalam binamarga.pu.go.id.
   b. UPT tidak boleh membuat aplikasi sendiri, dapat menggunakan aplikasi pada unit kerja.
   c. Selama ini, Kementerian PUPR menyediakan anggaran pengelolaan *website* sekitar 39 Miliar per tahun. Dengan penyederhanaan ini, anggaran pengelolaan hanya sekitar 3 Miliar.

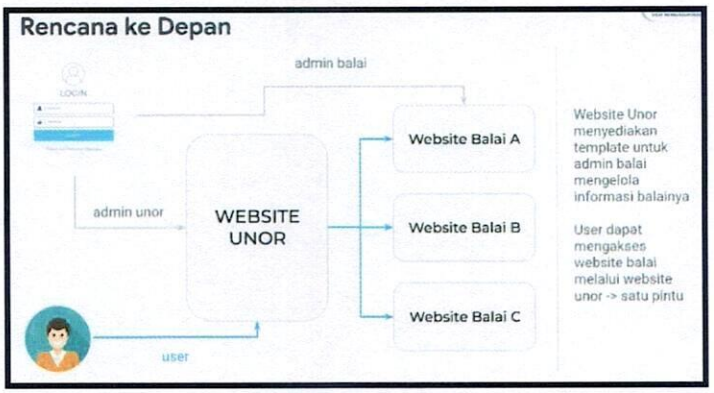
Asumsi Kebutuhan Biaya

No	Kategori	Jum Website Unor	Biaya / Bulan	Bulan	Total
1	Infrastruktur	12 * 1 orang	3.000.000	12	432.000.000
2	SDM IT	12 * 1 orang	8.000.000	12	1.152.000.000
3	SDM Humas	12 * 2 orang	8.000.000	12	2.304.000.000
	TOTAL				3.888.000.000

No	Kategori	Jum Website Unker	Biaya / Bulan	Bulan	Total
1	Infrastruktur	121 * 1 orang	3.000.000	12	4.356.000.000
2	SDM IT	121 * 1 orang	8.000.000	12	11.616.000.000
3	SDM Humas	121 * 2 orang	8.000.000	12	23.232.000.000
	TOTAL				39.204.000.000

d. Adanya risiko *website* jika tidak terintegrasi sebagai berikut:
   - Celah keamanan website tinggi
   - tingkat kompetensi pengelola berbeda
   - pemantauan konten sulit
   - potensi perbedaan informasi antara website balai dan unit organisasi

e. *Website* unit organisasi menyediakan *template* untuk admin balai mengelola informasi balainya. Pengguna dapat mengakses website balai melalui website unit organisasi (satu pintu) seperti tergambar sebagai berikut:



f. Hal terkait pengaduan, peraturan yang berlaku, dan permohonan informasi publik melalui *web* kementerian (SP4N-Lapor, JDIH, ePPID).

3. Sesi Diskusi

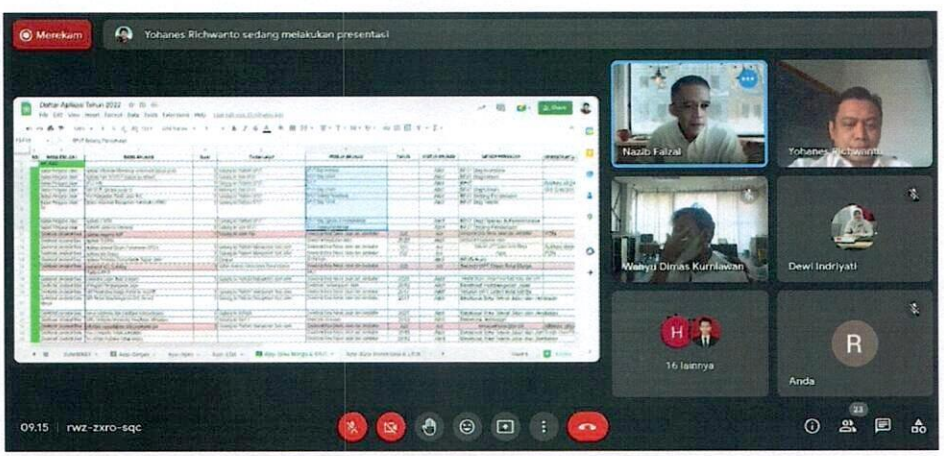
NO	Pertanyaan	Jawaban
1	*Template website* dibuat dari pusat, apakah balai-balai masih boleh mengubah template agar sesuai dengan kebutuhan balai?	*Template* dapat dibuat fleksibel dalam perubahan. Konsep template dibuat dengan mengakomodir masukan-masukan dari seluruh balai sehingga dapat seragam.
2	Penggabungan aplikasi perizinan pada binamarga (OKSIP, SIP3RUMIJATOL), apakah sebaiknya fokus untuk integrasi	Fokus untuk integrasi dengan OSS terlebih dahulu karena lebih diutamakan keperluannya.

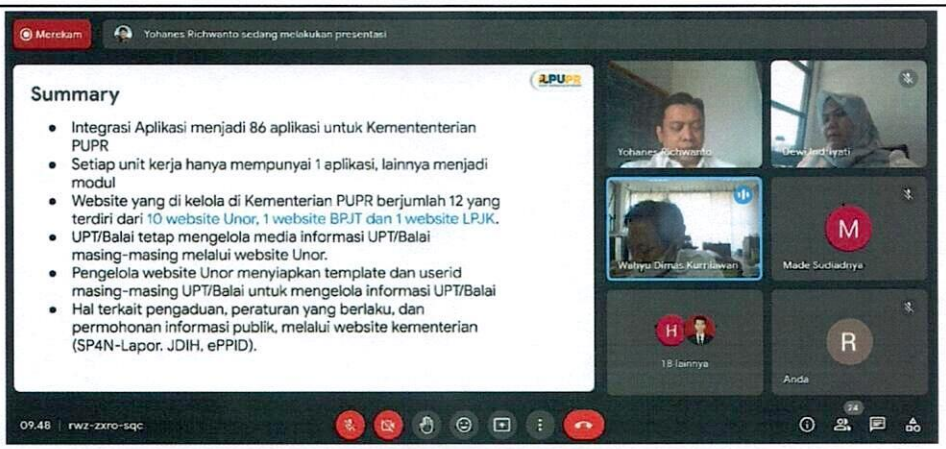
	dengan OSS terlebih dahulu?	
3	Penggabungan aplikasi, perlu koordinasi terlebih dahulu karena sistem yang sudah dibangun memiliki *environment system* yang berbeda-beda.	Dapat menggunakan SSO atau *hyperlink* yang diletakkan pada Portal Utama. Namun, kedepannya perlu dikembangkan menjadi 1 DBMS.
4	Penggabungan website unor dan balai akan dikomunikasikan ke balai untuk tidak lanjut karena website yang sudah dibuat memiliki *framework* yang berbeda-berbeda. bagaimana arahan cepatnya?	Dapat menggunakan SSO atau *hyperlink* yang diletakkan pada Portal Utama.

Kesimpulan

- Integrasi aplikasi menjadi 86 aplikasi untuk Kementerian PUPR.
- Setiap unit kerja hanya mempunyai 1 aplikasi.
- *Website* yang dikelola di Kementerian PUPR berjumlah 12 terdiri dari 10 *website* Unor, 1 *website* BPJT, 1 *website* LPJK.
- Pengelola *website* unit organisasi menyiapkan *template* dan *userid* untuk masing-masing UPT/Balai. UPT/Balai tetap mengelola informasi UPT/Balai.
- Hal terkait pengaduan, peraturan yang berlaku, permohonan informasi publik, melalui *web* kementerian (SP4N-Lapor, JDIH, ePPID).
- Akan dilanjutkan diskusi internal pada masing-masing unit kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Dokumentasi





NO	PEMILIK APLIKASI	NAMA APLIKASI	Tindak Lanjut
1	BPJT Bag Investasi	Aplikasi Informasi Monitoring (moonvest.bpjt.pu.go.id)	Gabung ke Platform BPJT
2	BPJT Bag Umum	Aplikasi Tarif Tol BPJT (bpjt.pu.go.id/tarif/)	Gabung ke Web BPJT
3	BPJT	BPJT Info	Gabung ke Platform BPJT
4	BPJT Bag Umum	GIS BPJT (gis.bpjt.pu.go.id)	Gabung ke Web BPJT
5	BPJT Bidang Pendanaan	SIM Pengadaan Tanah Jalan TOL	Gabung ke Platform BPJT
6	BPJT Bag Teknik	Sistem Informasi Manajemen Konstruksi (SIMK)	Gabung ke Platform BPJT
7	BPJT Bag Operasi & Pemeliharaan	Aplikasi e-SPM	Gabung ke Platform BPJT
8	BPJT Bidang Pendanaan	Website Jalan Tol Indonesia	Gabung ke Web BPJT
9	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Aplikasi Inspeksi AMP	Gabung ke Jalan Kita
10	Direktorat Kepatuhan Inten	Aplikasi KI-BiMa	
11	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Aplikasi Manual Desain Perkerasan (SPDJ)	Gabung ke Platform Manajemen Aset Jalan
12	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Aplikasi Mix Design	Gabung ke Platform Manajemen Aset Jalan
13	BPJN Aceh	Aplikasi Perizinan Pemanfaatan Bagian Jalan	Dihapus
14	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Autodesk AEC Bundling	Bukan Aplikasi Administrasi Pemerintahan
15	BPJT	Platform BPJT	
16	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Elektronik Leger Jalan (Elegan)	Gabung ke Platform Manajemen Aset Jalan
17	Direktorat Pembangunan Jalan	eProgram Pembangunan Jalan	
18	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	GIS Portal Bina Marga (Portal for ArcGIS)	Gabung ke Platform Manajemen Aset Jalan
19	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	GIS Server Bina Marga (ArcGIS Server)	Gabung ke Platform Manajemen Aset Jalan
20	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Ibena (Informasi dan Database Kebencanaan)	Gabung ke SITABA

21	Direktorat Jembatan	IMKJ (Integrasi Monitoring Kesehatan Jembatan)	Gabung ke INVI-J
22	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Interface Geodatabase BM/Dashboard BM	Gabung ke Platform Manajemen Aset Jalan
23	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Invi-J (Inspeksi Visual Jembatan)	
24	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Invi-Slope (Inspeksi Visual Slope)	
25	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	IRMS (Indonesia Road Management System) V.3	Bukan Aplikasi Administrasi Pemerintahan
26	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	JELI (Jendela Layanan Informasi dan Ide)	
27	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Katalog online perpustakaan (Slims)	Gabung ke Web Bina Marga
28	BBPJN Jawa Timur - Bali	Layanan Informasi AMP BBPJN VIII	Dihapus
29	Sekretariat Ditjen Bina Marga	Monitoring PHLN	Gabung ke Manajemen Aset Jalan
30	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	OJS Jurnal Jalan Jembatan	Gabung ke Web Bina Marga
31	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Pangkalan Data Berbasis Geospasial Ditjen BM	Gabung ke Manajemen Aset Jalan
32	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Perpustakaan Ditjen Bina Marga	Gabung ke Web Bina Marga
33	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	POK (Petunjuk Operasional Kegiatan)	Gabung ke Manajemen Aset Jalan
34	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Repository Perpustakaan	Gabung ke Web Bina Marga
35	- Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta - Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	SIPAKAR (Sistem Informasi Padat Karya)	
36	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	SiPDJN (Sistem Masukan Data)	Gabung ke Manajemen Aset Jalan
37	BPJN Banten	SIPETIR (Sistem Perizinan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan)	Dihapus
38	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	SIPP (Sistem Informasi Pemantauan Proyek) Terpadu	Gabung ke Manajemen Aset Jalan
39	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Sistem Expert untuk Penanganan Jembatan	Gabung ke INVI-J
40	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Sistem Informasi Dokumen Teknis Ditjen Bina Marga (SIKUMIS)	Gabung ke Manajemen Aset Jalan
41	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Sistem Informasi Jalan Kita 2.0	
42	Balai Struktur Jembatan, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Sistem Informasi Jembatan Khusus dan Terowongan	Gabung ke INVI-J
43	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Sistem Informasi Kepegawaian	Gabung ke Web Bina Marga
44	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Sistem Informasi Manajemen Drainase Jalan (SIMDJ)	Gabung ke Manajemen Aset Jalan
45	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan RUMIJA Tol	
46	BBPJN Sulawesi Selatan	Sistem Pelayanan Publik Terpadu Balai 13 Makassar	Dihapus
47	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	SITIA (Sinergitas Transparansi Integrasi Akuntabel)	Dihubungkan dengan E-PUSAKA

48	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Survei Cepat Drainase	Gabung ke Jalan Kita
49	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Tableau Server	Bukan Aplikasi Administrasi Pemerintahan
50	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	VISSIM	Bukan Aplikasi Administrasi Pemerintahan
51	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	VISSUM	Bukan Aplikasi Administrasi Pemerintahan
52	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	WIM Bridge (Weight In Motion)	Bukan Aplikasi Administrasi Pemerintahan